



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTOYO
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
3. NHK : 113211

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.961.728.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m²/100 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m²/45 m² di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 1779 m² di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 25.632.000
4. Tanah Seluas 3600 m² di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 1800 m² di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 55.776.000
6. Tanah Seluas 369 m² di KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1057 m²/40 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
8. Tanah Seluas 2000 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
9. Tanah Seluas 200 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
10. Tanah Seluas 300 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
11. Tanah Seluas 200 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
12. Tanah Seluas 470 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000
13. Tanah Seluas 1854 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.320.000



14. Tanah Seluas 1300 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI	Rp.	
170.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	125.000.000
1. MOTOR, SUZUKI SHOGUN SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI		
Rp. 2.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI		
Rp. 3.000.000		
3. MOBIL, IZUSU PANTHER Tahun 2009, HASIL SENDIRI	Rp.	
120.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	24.491.360
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.111.219.360
III. HUTANG	Rp.	46.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.065.219.360

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.